

PEMBANGUNAN TOL JOGJA - SOLO Juni, Masuk Ringroad Sleman

SLEMAN (KR) - Penimbunan material untuk membangun badan jalan tol Jogja - Solo seksi 2 paket 2.2 sepanjang 3,25 kilometer saat ini sudah tembus dari junction Sleman di Tirtoadi sampai Kalurahan Trihanggo. Ditargetkan pekerjaan kontruksi proyek jalan tol ini segera masuk ke area Ringroad Utara Sleman.

"Insyallah, bulan Juni nanti kita sudah bisa masuk ke area Ringroad Utara. Kami akan melakukan pekerjaan fisik di Ringroad Utara sebagai bagian dari pekerjaan jalan tol Jogja- Solo paket 2.2 yang ada di Kalurahan Trihanggo," kata Pejabat Humas PT Adhikarya, kontraktor yang membangun jalan tol Jogja Solo paket 2.2, Agung Murhandjanto, Rabu (15/5).

Menurutnya, Ringroad Utara Sleman yang menjadi area kontruksi jalan tol Jogja - Solo paket 2.2 ini dimulai dari depan Kampus UTY atau sebelah barat flyover Jombor hingga tikungan Ngawen di Kalurahan Trihanggo. Total

panjangnya sekitar 1 kilometer. Nantinya area kontruksi yang berada di median tengah Ringroad Utara selebar 12 meter akan diamankan menggunakan beton dan ditutup seng.

"Saat pekerjaan kontruksi berjalan, arus lalu lintas tetap dibuka. Artinya tidak ada penutupan jalan. Hanya saja pengendara diimbau lebih hati-hati karena terjadi penyempitan badan jalan. Sebab bagian tengah Ringroad dipagar untuk digunakan sebagai area kontruksi," ungkap Agung.

Dijelaskan pula, saat ini pihaknya sudah mulai bersiap di antaranya berkoordinasi dengan Dishub,

Polri maupun beberapa instansi terkait di Kabupaten Sleman untuk mengatur bagaimana mekanisme lalulintasnya.

"Salah satunya kan kita sudah buka separator (pembatas) jalur lambat. Jadi nanti kendaraan yang melintas tidak ada jalur cepat dan jalur lambat karena separatornya sudah dihilangkan. Kemudian di bagian tengah, selebar 12 meter akan kami kasih pembatas representatif untuk area proyek," bebernya.

Menurut Agung, pekerjaan fisik kontruksi jalan tol Jogja - Solo paket 2.2 sampai pertengahan Mei ini sudah mencapai 28 persen. Jalan tol yang membentang di tiga Kalurahan yakni Tirtoadi, Tlogoadi, Trihanggo Sleman ini bahkan sudah terhubung dengan jalan tol Jogja- Bawen seksi 1. Titik sambung untuk kedua jalan bebas hambatan ini berada di Padukuhan Sanggrahan Kalurahan Tirtoadi Sleman. **(Has)-f**



KR-Istimewa

Pekerja pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo menunjukkan progres pembangunan.

CALEG YANG MAJU PILKADA 2024 KPU Saat Ini Nyatakan Harus Mundur

JAKARTA (KR) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, calon legislatif (caleg) terpilih di Pemilu 2024 harus menundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Hasyim dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (15/5). Sebelumnya, ia menyatakan caleg terpilih tak harus mundur bila maju pilkada.

Hasyim menjelaskan, dalam UU Pilkada menentukan, jika ada anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota didaftarkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus menundurkan diri dari jabatannya.

"Pada dasarnya di UU Pilkada menentukan, kalau ada anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota didaftarkan sebagai calon, yang bersangkutan harus menundurkan diri dari jabatannya. Ini bagi anggota," ujar Hasyim.

Meski begitu, bagi calon terpilih yang belum dilantik maka yang bersangkutan harus bersedia menundurkan diri

sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD atau DPRD walaupun belum dilantik.

"Jadi, kalau belum dilantik itu statusnya adalah sebagai calon terpilih. Maka apabila yang bersangkutan didaftarkan partai politik sebagai calon atau bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang bersangkutan harus bersedia menundurkan diri," terangnya.

Adapun syarat atau dokumen yang diperlukan adalah surat pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD yang diserahkan paling lambat lima hari setelah penetapan pasangan calon (paslon) di Pilkada 2024. Dokumen kedua adalah tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri tersebut.

Ketiga, surat keterangan, pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, Hasyim juga memberikan simulasi. Ia menuturkan dalam tahapan pilkada pendaftaran calon dilaksanakan tanggal 27-29 Agustus 2024. **(Ant)-d**



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

FESTIVAL DALANG CILIK: Peserta memainkan wayang kulit saat Festival Dalang Cilik (FDC) 2024 dalam rangkaian Dies Natalis ke-60 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Kampung Emas, Krapyak IX, Margoagung, Seyegan, Sleman, Rabu (15/5/2024). Acara yang diikuti 30 dalang cilik jenjang SD dan SMP dari berbagai daerah di Jawa Tengah, DIY, hingga Lampung tersebut menjadi semangat regenerasi dalang muda serta pelestarian wayang kulit.



Sistem Pemilu Perlu Dikaji Ulang

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sepakat sistem Pemilihan Umum (Pemilu) perlu dikaji ulang setelah mendengarkan pembahasan rapat evaluasi pemilu bersama Komisi II DPR RI. Semua masukan dari para Anggota Komisi II DPR RI tentang evaluasi pemilu itu bakal dicatat pihaknya untuk dikaji bersama para ahli dengan kajian ilmiah.

"Intinya kami sendapat agar ada desain ulang untuk sistem kepilimuan, belajar dari pemilu sebelumnya, yang baik kita pertahankan, yang buruk kita perbaiki," kata Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5).

Ia mengatakan, dinamika proses demokrasi yang terjadi sejauh ini adalah pengaruh dari proses politik pasca Reformasi 1998. Menurutnya bangsa ini telah memilih untuk menjalankan sistem demokrasi liberal, tetapi sistem itu dinilai kurang baik jika diterapkan di negara yang mayoritas masyarakat menengah ke bawah.

Untuk itu, ia mengatakan Kemendagri bakal menggelar sejumlah forum diskusi terkait permasalahan sistem kepilimuan. "Segala macam koreksi akan menjadi masukan," ucap Tito Karnavian.

Selain itu, perbaikan sistem tersebut melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang dan dampaknya justru kurang baik terhadap bangsa. Terlepas dari berbagai persoalan yang ada, menurut Tito, Kemendagri memiliki pandangan, Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari lalu itu berjalan dengan aman dan kondusif.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia tak menampik dirinya mendengar isu adanya

transaksional hingga tingkat bawah. Hal itu timbul karena adanya preseden dari tingkatan di atasnya. "Itu semuanya bisa karena sebab akibat, perilaku menyimpang, soal transaksional, berarti ada kebutuhan," kata Doli.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI siap memberikan masukan strategis, kata anggota KPU Idham Holik. Ia meyakini pembentukan undang-undang sudah mengendahkan hal tersebut mengingat Pemilu 2024 masih menggunakan UU No 7 Tahun 2017. Menurutnya, akan ada perubahan pada UU Pemilu. Pihaknya yakin UU Pemilu ke depan akan dilakukan perubahan

han. "Kita tunggu saja waktunya kapan diagen-dakan," jelasnya. Sebelumnya, Senin (22/4), Ketua Mahkamah Konstitusi Suharto mengataka terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu. Kelemahan tersebut pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu.

Menurut Suharto saat itu, UU Pemilu belum memberikan pengaturan tentang kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai. Demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilu maupun pilkada selanjutnya, lanjut Suharto, penting bagi pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan UU Pemilu dan UU Pilkada. **(Ant/Obi)-d**

SESUAI PERPRES 59/2024

Kelas dan Tarif KRIS Dievaluasi

JAKARTA (KR) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan, ketentuan seputar jenjang kelas pada layanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) hingga penyesuaian iuran peserta dievaluasi berdasarkan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

"Ke depan ini masih ada evaluasi yang akan dilakukan antarkementerian dan lembaga," kata Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugrah dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta, Rabu (15/5).

Ia mengatakan, evaluasi terhadap ketentuan klasifikasi rawat inap hingga penyesuaian iuran peserta dibahas melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Keuangan (Kemenkeu),

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Kesehatan. Hal itu sesuai Pasal 103B Perpres Jaminan Kesehatan yang menyatakan, penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025.

"Tentunya kami akan sama-sama melihat dari implementasi Perpres ini sampai 30 Juni 2025," katanya.

Selama proses evaluasi bergulir, kata Rizzky, besaran iuran peserta BPJS Kesehatan masih tetap sama, mengacu pada Perpres 64 Tahun 2020 yang masih berlaku, karena tidak ada penghapusan jenjang kelas.

Hasil evaluasi terhadap implementasi KRIS sesuai Perpres akan menjadi landasan bagi BPJS Kesehatan dalam penetapan

manfaat layanan bagi peserta, tarif yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit, dan penyesuaian iuran bagi peserta. "Sampai saat ini, pelayanan di fasilitas kesehatan masih sama, seperti sebelum Perpres 59 ini berlaku," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur peningkatan mutu standar pelayanan melalui KRIS. Perpres yang terbit 8 Mei 2024 itu salah satunya mengatur tentang standar kelas ruang rawat inap yang mencakup 12 kriteria, mulai dari kualitas bangunan, pencahayaan, kamar mandi dalam, hingga instalasi oksigen.

Kemenkes menargetkan 3.060 rumah sakit nasional mengimplementasikan KRIS bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni

2025. "Ini saya sampaikan, ada 3.176 rumah sakit (RS) secara nasional. Yang akan diimplementasikan masuk KRIS itu 3.060 RS, sedangkan targetnya 30 April 2024 sebanyak 2.858 RS," kata Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril.

Hingga 2023, kata Syahril, pengelola rumah sakit yang sudah siap mengimplementasikan KRIS berjumlah 1.216 RS. Sementara, capaian implementasi KRIS di periode yang sama mencapai 995 rumah sakit.

Dikatakan Syahril, Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Layanan Kesehatan masih berupaya mengejar tambahan implementasi KRIS di tahun ini mencapai 2.432 rumah sakit, dari realisasi di 30 April 2024 sebanyak 1.053 rumah sakit. "Nanti di Juni 2025 itu akan kita realisasikan sebanyak 3.057 rumah sakit," ujarnya. **(Ant)-f**